

## KATA PENGANTAR

Laporan keuangan Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri ini merupakan laporan yang menggambarkan tentang pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri untuk Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan ini terdiri dari 5 (lima) macam yaitu :

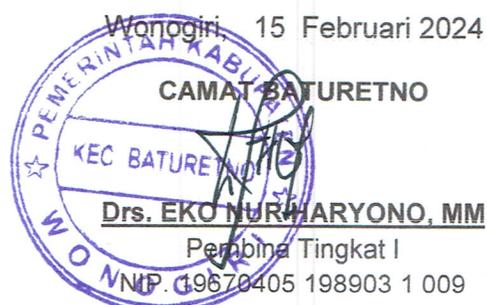
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan Camat Baturetno Kabupaten Wonogiri yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai serta telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna,, namun demikian untuk aspek pertanggungjawaban pengelola keuangan, kami telah berupaya untuk selalu mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan sehingga hasilnya pun diharapkan tetap sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu untuk kesempurnaan laporan keuangan ini, kami mohon saran dan masukan sekaligus koreksi dari semua pihak yang terkait, dengan harapan pada tahun tahun yang akan datang Laporan Keuangan kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dapat disusun dan tersaji dengan lebih baik.

Wonogiri, 15 Februari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**KECAMATAN BATURETNO**

Jalan Raya Solo Pacitan Baturetno Nomor 1 Baturetno 57673  
Telepon (0273) 461001  
website [kec.baturetno.wonogirikab.go.id](http://kec.baturetno.wonogirikab.go.id) Email [kecbaturetno@gmail.com](mailto:kecbaturetno@gmail.com)

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Baturetno yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca per 31 Desember 2023
5. Catatan Atas Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

1. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, posisi keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.
2. Data dan Angka angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang kami buat sudah di cros cek dengan Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Wonogiri dan sudah memadai untuk menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 15 Februari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

## KECAMATAN BATURETNO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Laporan Keuangan disusun sebagai laporan pertanggungjawaban OPD Kecamatan Baturetno guna menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola sehingga bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan Kecamatan Baturetno merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang harus disajikan bersama sama dengan dilampiri bukti – bukti yang relevan.

##### *A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan*

###### 1. Maksud

Maksud Laporan Keuangan Kecamatan Baturetno disajikan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

###### 2. Tujuan

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi, sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai Sumber, Alokasi dan Penggunaan Sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang di tetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

##### *B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan*

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan didasarkan pada :



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### **KECAMATAN BATURETNO**

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

1. Undang-undang no 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**KECAMATAN BATURETNO**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- a. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD

- a. Kebijakan Keuangan
- b. Indikator Pencapaian target kinerja APBD

BAB III Kebijakan Akuntansi

- a. Akuntansi Pendapatan
- b. Akuntansi Beban
- c. Akuntansi Belanja
- d. Akuntansi Aset
- e. Akuntansi Kewajiban
- f. Akuntansi Ekuitas
- g. Koreksi Kesalahan

BAB IV Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

- a. Ikhtisar realisasi Pencapaian target Keuangan
- b. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- a. Rincian Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
  1. Pendapatan – LRA
  2. Belanja – LRA
  3. Surplus/ Defisit – LRA
- b. Rincian Penjelasan Laporan Operasional
  1. Pendapatan – LO
  2. Beban – LO
  3. Surplus/ Defisit – LO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

## **KECAMATAN BATURETNO**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

- c. Rincian Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Rincian Penjelasan Neraca
  - 1. Aset lancar
  - 2. Aset Tetap
  - 3. Aset lainnya
  - 4. Kewajiban
  - 5. Ekiutas

### BAB VI Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan

- a. Organisasi
- b. Kebijakan
- c. Struktur Organisasi Pemerintahan

### BAB VII Penutup

### Daftar Lampiran



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### **A. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan umum Anggaran ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan, Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD. Kebijakan Anggaran belanja daerah yang digunakan adalah sebagaimana berikut;

1. Mengutamakan belanja yang bersifat wajib (Fix cost) baru kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja;
2. Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang disyaratkan;
3. Terarah, terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia;
4. Selalu memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan Negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang;
5. Kegiatan-Kegiatan skala desa maupun kegiatan skala dusun akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang dialokasikan melalui APBD setiap tahun, kecuali kegiatan rehabilitasi akibat bencana alam/ bencana social;
6. Pengalokasian belanja kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan prasarana Fisik harus memperhatikan aspek pemerataan, keseimbangan antar wilayah dan keterpaduan dengan program/ kegiatan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang telah dilaksanakan.

#### **B. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Belanja di OPD Kecamatan Baturetno Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 4 Program 12 kegiatan yang dijabarkan menjadi 24 Sub kegiatan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan ASN , pembayaran TPP dan pembayaran kebutuhan kantor yang bersifat kebutuhan rutin maupun accidental sesuai prioritas kebutuhan pada kantor Kecamatan Baturetno.

Adapun rencana tindak – lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada masing masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.  
Program ini terdiri atas 7 kegiatan yang terdiri dari 17 Sub kegiatan yang mengakomodir kebutuhan kebutuhan rutin yang harus dibayar atau dicukupi tepat waktu/ jumlah agar pelaksanaan administrasi kantor dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kebutuhan tersebut



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### **KECAMATAN BATURETNO**

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

antara lain Materai, Langganan telepon, langganan air, langganan listrik, peralatan kebersihan, ATK, Cetak, Penggandaan, Komponen Listrik/ Penerangan, Kelengkapan Komputer, Makan Minuman Rapat, Penyediaan peralatan rumah tangga, Biaya perjalanan Dinas luar Daerah, Honor Non PNS, Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan gedung Kantor dan Pemeliharaan sarana Prasarana Gedung kantor.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan mencakup 3 Sub kegiatan. Yaitu terdiri dari Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan dan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Sub kegiatan Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yang mencakup 2 Sub Kegiatan yaitu Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Sub Kegiatan pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

## KECAMATAN BATURETNO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

### BAB III

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan umum kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap Anggaran dan antar periode. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengukuran dan pengungkapan transaksi – transaksi specific dan peristiwa peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintah.

Tujuan Khusus kebijakan Akuntansi adalah memberikan acuan bagi :

1. Penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar;
2. Pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
3. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan akuntansi berlaku untuk entitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum (BLUD). Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Namun dalam hal Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasar basis Kas.

#### A. Akuntansi Pendapatan – LRA

##### 1. Pengakuan Pendapatan – LRA

Pendapatan diakui pada saat :

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

##### 2. Pengukuran Pendapatan – LRA



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber Pendapatan daerah dengan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang dalam terhadap pendapatan – LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerima kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktifitas pihak lain daripada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktu singkat.

#### 3. Penyajian pendapatan – LRA

Pendapatan – LRA disajikan pada laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan – LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### *Akuntansi Pendapatan - LO*

##### 1. Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan – LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan Bos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

##### 2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

- a. Kebijakan Akuntansi – LO untuk PPKD meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain lain pendapatan daerah yang sah serta pendapatan non operasional;
- b. Kebijakan Akuntansi – LO OPD hanya khusus pendapatan asli daerah.

##### 3. Pengakuan Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

##### 4. Pengukuran pendapatan – LO



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Pendapatan – LO operasional non pertukaran, diukur sebesar asset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- b. Pendapatan – LO dari transaksi pertukaran, diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan – LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang dan jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

#### *B. Akuntansi Beban*

##### 1. Pengukuran Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi asset atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh : tagihan rekening telepon, tagihan rekening air dan tagihan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

- a. Pengakuan beban pada PPKD adalah beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan social, beban penyisihan piutang dan beban transfer.

- b. Pengakuan beban pada OPD adalah :

Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus diberikan kepada PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### *C. Akuntansi Belanja*

##### 1. Pengakuan belanja



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

#### 2. Pengukuran belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### D. Akuntansi asset

Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri atas :

1. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek antara lain deposito, surat utang Negara (SUN) dan sertifikat Bank Indonesia (SBI). Jenis piutang antara lain piutang pajak, retribusi, transfer dan piutang lainnya. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya alat tulis kantor, barang habis pakai, dan lain-lain.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau public.

#### *Penilaian Aset Tetap*

Aset tetap dinilai dari total semua pengeluaran atau biaya perolehan sampai aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Adapun komponen biaya yang diakui sebagai biaya perolehan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**KECAMATAN BATURETNO**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak
Jalan, Irigasi dan Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

*Kapitalisasi Aset Tetap*

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi menjadi belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- Bertambah umur ekonomis, dan/atau
- Bertambah volume, dan/atau
- Bertambah kapasitas produksi

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyusutan aset tetap pemerintah daerah tidak memiliki nilai sisa (*residu*) atau nol.

Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodic, melainkan diterapkan penghapusan pada Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan

Masa Manfaat



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

Ketentuan masa manfaat untuk perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kali dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Aset Tetap yang masih dimiliki sebelum 1 Januari 2023

1) Aset tetap yang masih memiliki sisa masa manfaat

Perhitungan penyusutan dilakukan berdasarkan sisa manfaat yang dimiliki

2) Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya

Perhitungan penyusutan dilakukan dengan masa manfaat revisi

b. Aset tetap yang dimiliki setelah 1 Januari 2023

Penyusutan dilakukan sejak bulan diperolehnya manfaat atas aset tetap

3) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain.

E. *Akuntansi Kewajiban*

1. Klasifikasi kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban jangka pendek PPKD terdiri atas utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya,
- Kewajiban jangka pendek OPD terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya

b. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar setelah waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang hanya dimiliki oleh PPKD, yang terdiri atas utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat :

- Dana pinjaman diterima oleh pemerintah , atau
- Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah, atau
- Pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

#### F. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurangi oleh surplus/deficit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain lain.

Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas sisa SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan laporan realisasi Anggaran dan Laporan perubahan SAL mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, estimasi perubahan SAL dan surplus/defisit LRA.

2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening Koran (R/K PPKD)

#### G. Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan adalah tindakan pembedulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan terdiri atas:

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali.

2. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis jenis tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misal: penerimaan pajak dari WP yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi ataupun tambahan kekurangan pembayaran.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**KECAMATAN BATURETNO**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

*A. Rincian Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran*

1. Pendapatan – LRA

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, pendapatan selain berasal dari potensi daerah juga bisa berasal dari propinsi dan pusat. OPD kecamatan Baturetno untuk tahun ini belum memiliki wewenang mengelola pendapatan sehingga tidak ada realisasi pendapatan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran.

2. Belanja – LRA

Belanja OPD kecamatan Baturetno terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan Realisasi Belanja tahun anggaran 2023 serta Realisasi tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Berlebih (Berkurang)	Realisasi 2022
1	Belanja Operasi	2.159.479.447,-	1.777.933.206,-	82,33	berkurang	1.825.905.224,-
2	Belanja Modal	4.939.500,-	4.939.500,-	100	berkurang	4.845.390,-
		2.164.418.947,-	1.782.872.706,-	82,37	berkurang	1.830.750.614,-

Data di atas menunjukkan total anggaran belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp.2.164.418.947,- terealisasi sebesar Rp. 1.782.872.706,- atau 82,37%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.830.750.614,- artinya mengalami penurunan sebesar Rp. 47.877.908,-,-Adapun rincian sebagaimana di bawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**KECAMATAN BATURETNO**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Berlebih (Berkurang)	Realisasi 2022
1	Belanja Pegawai	1.821.952.599,-	1.456.806.809,-	79,96	berkurang	1.590.437.549,-
2	Belanja Barang dan Jasa	337.526.848,-	321.126.397,-	95,14	berkurang	235.467.675,-
		2.158.479.447,-	1.777.933.206,-	82,33	berkurang	1.825.905.224,-

Data di atas menunjukkan total anggaran belanja operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.158.479.447,- terealisasi sebesar Rp. 1.777.933.206,- atau 82,33, %. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.825.905.224,- artinya mengalami penurunan sebesar Rp. 47.972.018,-

- Belanja Pegawai merupakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja, honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. Belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.821.952.599,- terealisasi sebesar Rp. 1.456.806.809,- atau 79,96%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.590.437.549,- artinya mengalami penurunan sebesar Rp.133.630.740,-

Rincian lengkap belanja pegawai adalah sebagai berikut :

No	Rincian Belanja Pegawai	Realisasi 2023
1	Gaji dan Tunjangan	866.510.359,-
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	590.296.450,-
3	Uang Lembur	-
4	Belanja Honorarium	-
	Jumlah Belanja Pegawai	1.456.806.809,-



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**KECAMATAN BATURETNO**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 337.526.848,-, terrealisasi sebesar Rp. 321.126.397,- atau 95,14%. Jika dibandingkan dengan tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 243.214.250,- artinya mengalami Penurunan sebesar Rp.94.312.598,-

No	Rincian Belanja Barang Jasa	Realisasi 2023
1	Belanja Bahan Habis Pakai	152.391.850,-
2	Belanja Jasa Kantor	108.330.717,-
3	Belanja iuran jaminan asuransi	4.289.664,-
4	Belanja sewa peralatan dan mesin	11.246.000,-
5	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	23.369.520,-
6	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	-
7	Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri	16.578.000,-
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	316.205.751,-

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan dengan pengadaan barang dan jasa Dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset tetap lainnya. Belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp.4.939.500,- terrealisasi sebesar Rp. 4.939.500,- Atau 100%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.845.390 –artinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 94.110

NO	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Berlebih (Berkurang)	Realisasi 2022
1	Belanja Modal	4.939.500,-	4.939.500,-	100	berkurang	4.845.390,-
	Jumlah Belanja Modal	4.939.500,-	4.939.500,-	100		4.845.390,-

Dengan realisasi tahun anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	Rincian Belanja Modal	Realisasi 2023
1	Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga	4.939.500,-
2	Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar	-
3	Belanja modal alat laboratorium	-
4	Belanja modal komputer	-
	Jumlah Belanja Modal	4.939.500,-



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**KECAMATAN BATURETNO**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

*B. Rincian Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas*

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp. 1.285.766.977,63- yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023
2. Surplus/defisit – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.916.690.407,21- merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual).
3. R/K PPKD adalah sebesar Rp.1.782.872.706,00- merupakan total realisasi anggaran dikurangi setoran UYHD 2023
4. Dari point 1-4, serta adanya Aset Antar OPD senilai 404.892.956 akan Jumlah ekuitas akhir OPD Kecamatan Baturetno adalah sebesar Rp. 1.556.842.232,42-

*C. Rincian Penjelasan Neraca*

Neraca SKPD Kecamatan Baturetno terdiri atas aset dan kewajiban. Aset dijabarkan menjadi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan kewajiban meliputi atas kewajiban jangka pendek dan ekuitas.

1. Aset Lancar

Aset Lancar hanya mengakomodir saldo persediaan. Saldo persediaan memiliki kriteria pakai habis, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Saldo persediaan tahun anggaran 2023 yaitu saldo persediaan ATK sebagaimana rincian berikut :

No	JENIS PERSEDIAAN	NILAI
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	275.050,-
2	Persediaan Barang Cetak	-
jumlah		

Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bahwa metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir.



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang ditunjukkan disini adalah jumlah dan nilai dari belanja modal dan/ atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan.

Aset Tetap OPD Kecamatan Baturetno per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.338.093.036,63- Mengalami kenaikan 0,167% menjadi sebesar Rp. 1.607.448.136,42 Per 31 Desember 2023. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

NO	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/penurunan
a	Tanah	725.083.784,-	725.083.784,-	tetap
b	Peralatan dan Mesin	1.453.848.358,-	1.062.680.152,-	naik
C	Gedung dan bangunan	941.693.000,-	941.693.000,-	tetap
d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.633.200,-	39.633.200,-	tetap
e	Aset Tetap Lainnya	52.609.425,-	30.945.175,-	naik
F	<i>Akumulasi Penyusulan</i>			
	<i>Jumlah Aset Tetap</i>			

#### 3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan dan dana cadangan. Aset lainnya yang terdapat di OPD Kecamatan Baturetno adalah aset lain-lain, di mana merupakan kumpulan dari aset-aset tetap yang masih dalam proses penghapusan. Adapun nilai dari aset lain-lain tersebut sebesar Rp.52.609.425,-

#### 4. Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki OPD Kecamatan Baturetno adalah berupa jangka pendek yang menggambarkan jumlah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek yang menjadi tanggungan berupa utang belanja pegawai dan belanja jasa langganan sebesar Rp. 50.605.904,- Dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**KECAMATAN BATURETNO**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

NO	RINCIAN HUTANG	KANTOR KEC. BATURETNO	JUMLAH
1	Langganan Telepon bulan Des,2022	Kec. Baturetno	Rp. 25.366,-
2	Langganan Air bulan Des 2022	Kec. Baturetno	Rp. 99.400,-
3	Hutang Langganan Listrik bulan Des'2022	Kec. Baturetno	Rp. 1.851.502,-
4	Beban Tambahan Penghasilan PNS 2022	Kec. Baturetno	Rp. 48.629.636,-
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 50.605.904,-</b>

5. Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Nilai ekuitas sebesar Rp. 1.556.842.232,42,-



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

#### BAB VI

#### PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

##### A. Organisasi

Kecamatan Baturetno, merupakan salah satu Organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas *meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan*. OPD Kecamatan Baturetno dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Baturetno mengacu pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desadan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur pembantu Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat adalah Sekertariat, yang dipimpin oleh Sekertaris . Sekertariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekertariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di lingkungan Kecamatan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### **KECAMATAN BATURETNO**

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

5. Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yang masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris. Adapun rincian tugas pada Sub Bagian adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian dan penatausahaan keuangan serta pelayanan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelola aset, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan.

Dalam menjalankan tugas Kecamatan, Camat selain dibantu oleh Sekretaris, juga membawahi 4 Seksi. Adapun Seksi dan rincian tugasnya adalah sebagaimana di bawah ini :

a. Seksi Tata Pemerintahan

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kordinasi, evaluasi pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan bidang tata pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kordinasi evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dan/atau Desa Kelurahan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

c. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kordinasi, evaluasi pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan bidang kesejahteraan rakyat dan sosial meliputi pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, social, tenaga kerja, pengkoordinasian pembinaan terhadap organisasi social kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.

d. Seksi Pelayanan Umum

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kordinasi, evaluasi pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas bidang pelayanan umum yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di Desa dan/atau Kelurahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

## B. Kebijakan

### 1. Visi dan Misi

- a. *Visi Pemerintah Kecamatan Baturetno Mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Yaitu :*  
**“Mewujudkan Masyarakat Wonogiri yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan Semangat Go nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wonogiri yang Maju Mewujudkan Masyarakat yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan sarana prasarana pemerintah sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Membangun masyarakat yang maju diimplementasikan dengan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas, pertumbuhan ekonomi, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi daerah, serta pengembangan infrastruktur wilayah yang maju.
2. Wonogiri yang mandiri merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu mandiri menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis sumberdaya local, baik modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, social, budaya, ekonomi dan politik.;
3. Wonogiri yang sejahtera adalah Masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya ( basic need) secara adil dan merata berprinsip pada Peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**KECAMATAN BATURETNO**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 
- 
4. Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri diartikan sebagai ajakan kebersamaan yang dilandasi semangat gotong royong untuk mewujudkan Wonogiri Sukses.

**b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi dan misi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021– 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
2. mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Wonogiri.
3. Memperkuat kapasitas Ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

**2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Baturetno.

OPD Kecamatan Baturetno sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung misi kepala daerah No 2 yaitu : Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Wonogiri.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 tahun di kecamatan Baturetno adalah : mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik. Dengan Indikator tujuan adalah Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Baturetno dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Baturetno dalam periode pembangunan 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan, dengan indicator sasaran antara lain:
  - a. Nilai SAKIP Kecamatan;
  - b. Indeks Profesionalisme ASN Kecamatan;
  - c. Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan;
  - d. Jumlah Inovasi Kecamatan
  - e. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### KECAMATAN BATURETNO

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

## 2. strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Baturetno dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalitas ASN;
2. Meningkatkan Agen perubahan Daerah;
3. Menciptakan Inovasi perangkat Daerah;
4. Meningkatkan Koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor kecamatan dalam rangka Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat;
5. Melaksanakan PATEN dan program e-KTP secara optimal;
6. Meningkatkan saran dan prasarana aparatur guna menunjang kelancaran pelayanan;
7. Meningkatkan kenyamanan lingkungan kantor kecamatan;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset;
9. Penyusunan laporan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
10. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa dan Kelurahan
11. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan social kemasyarakatan secara optimal;
12. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/ potensi insfrastuktur dasar wilayah;

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup :

### 1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pimpinan OPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

### 2. Eksternal

Mengikuti rapat koornisasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

### **KECAMATAN BATURETNO**

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

---

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Baturetno sebagai berikut :

1. Meningkatkan IKM dan menurunkannya keluhan masyarakat atas pelayanan masyarakat;
2. Meningkatnya pelayanan masyarakat Kecamatan dan kelurahan ;
3. Meningkatnya dukungan administrasi, sarana dan prasarana ;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah kecamatan;
6. Pembinaan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan penyusunan perencanaan kerja dan rencana strategis;
7. Fasilitasi peningkatan koordinasi dan pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah; dan
9. Pembinaan koperasi RT ditingkatkan.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

## KECAMATAN BATURETNO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

### BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Kecamatan Baturetno Tahun Anggaran 2023 ini kami buat, banyak kekurangan dalam penyajian Laporan ini sehingga kami mohon bantuan untuk dapat memperbaiki Catatan Atas Laporan Keuangan di tahun-tahun mendatang.

Dan semoga informasi ini bermanfaat.

Baturetno, 15 Februari 2024  
Camat Baturetno  
  
**Drs. EKO NUR HARYONO, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670405 198903 1 009